

ABSTRAK

Penerapan alasan penghapus pidana dalam melakukan perintah atasan, dalam hal melakukan perintah jabatan yang sah dan melakukan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. Isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah penerapan alasan penghapus pidana sekaligus kekaburan yang terdapat perbedaan penafsiran atas fakta, karena penerapan alasan penghapus pidana pada beberapa oknum kepolisian yang mendapat perintah dari atasan untuk menghalangi jalannya proses hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang berusaha meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah penerapan alasan penghapus pidana dalam hal melakukan perintah jabatan yang sah Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana tidak dapat diterapkan. Dikarenakan tanpa adanya prosedur yang sesuai ketentuan hukum acara baik penyelidikan dan penyidikan seperti surat tugas dan surat perintah. Akan tetapi, dalam hal melakukan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik dapat diterapkan karena perintah dari atasan yang menimbulkan kesalahan fakta yang tertuju pada salah satu perbuatan unsur pidana. Kemudian oknum kepolisian telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dalam hal melakukan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik Pasal 51 Ayat (2) KUHPidana.

Kata kunci: Penerapan, Alasan Penghapus Pidana, Penghalangan Proses Hukum.

ABSTRACT

The application of the reason for criminal expungement in carrying out superior orders, in terms of carrying out valid official orders and carrying out unauthorized official orders in good faith. The legal issue that will be discussed in this thesis is the application of the reason for criminal expungement as well as the vagueness that there are differences in interpretation of the facts, due to the application of the reason for criminal expungement on several police officers who received orders from superiors to obstruct the legal process.

The type of research that will be conducted is normative research, namely research that seeks to examine primary legal materials and secondary legal materials to resolve a particular legal problem. In addition, the approaches used are statutory approaches and case approaches.

The conclusion of this article is that the application of the reason for the elimination of punishment in terms of carrying out a valid official order Article 51 Paragraph (1) of the Criminal Code cannot be applied. Due to the absence of procedures in accordance with the provisions of procedural law both investigation and investigation such as letters of assignment and warrants. However, in the case of carrying out unauthorized official orders in good faith, it can be applied because of orders from superiors that cause errors of fact that are directed at one of the actions of the criminal element. Then the police officers have fulfilled the subjective requirements and objective requirements in terms of carrying out unauthorized official orders in good faith Article 51 Paragraph (2) of the Criminal Code.

Keywords: *Application, Reasons for Eliminating Criminals, Obstruction of Justice.*